

Judul : Bertemu Jokowi, Persatuan Perawat Minta Kejelasan Status PNS	
Media : Detik.com	Wartawan : Ray Jordan - detikNews
Tanggal : 04-Dec-2018	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : 1	NewsValue : 54375000
	AdValue : 18487500

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bertemu (Jokowi) di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, berbagai persoalan keperawatan dibahas, termasuk pembahasan soal kejelasan status perawat yang pernah dianggap sebagai non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018). Dalam pertemuan itu, didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden di tengah-tengah kesibukan dapat menerima kami PPNI seluruh Indonesia. Jadi kami membawa ketua-ketua PPNI provinsi seluruh Indonesia, cuma satu yang tidak bisa sampai di sini dari Maluku Utara terhambat belum sampai ini pada waktunya dan mohon maaf. Selebihnya inilah kami yang penting bisa bertemu Pak Presiden dan para menteri untuk bersilaturahmi dan diskusikan beberapa hal terkait keperawatan di Indonesia," ujar Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah.

Harif kemudian membacakan beberapa poin terkait usulan PPNI. Pertama, PPNI mendukung program pemerintah yang terkait Nawacita yang berfokus pada upaya preventif dan promotif untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

"Bahwa ketersediaan dan potensi perawat baik dari sisi jumlah kompetensi dan sebaran di seluruh Indonesia, kami mengusulkan perlu ditingkatkan pendayagunaan dalam melaksanakan dan mensukseskan program unggulan pemerintah. Untuk itu kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan," katanya.

Harif mengatakan, untuk mendukung usulan tersebut, diperlukan juga instrumen yang lain, seperti dukungan dari Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penempatan perawat di desa tersebut.

"Yang kedua untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan kami memerlukan adanya struktur keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan yang dapat merumuskan dan menentukan kebijakan strategis terkait dengan keperawatan ini. Sempat ada tetapi hari ini tidak ada lagi sehingga beberapa kalau kami mengusulkan kebijakan itu meminta cepat terkoordinir dengan baik sehingga memerlukan suatu struktur yang dulu pernah ada," jelasnya.

Selain itu, Harif mengatakan pihaknya bersyukur karena pemerintah telah menyetujui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Ini sesuatu yang lebih baik dan mudah-mudahan kami mohon implementasinya di pemda yang mungkin perlu diawasi karena keluhan di daerah di provinsi-provinsi ini terkait kebijakan dalam otonomi daerah," katanya.

Harif juga menambahkan, pihaknya masih memerlukan adanya kebijakan yang jika dimungkinkan didukung dengan perpres. Ini terkait dengan status para perawat yang pernah direkrut sebagai abdi negara tetapi non-PNS.

"Kami masih memerlukan kebijakan seandainya dimungkinkan bapak keluarkan perpres terkait dengan para perawat-perawat yang sudah pernah direkrut sebagai abdi negara non-PNS, tapi sebelum PP No 48 tahun 2005 yang melarang menerima honor, tetapi mereka sudah bekerja dan sampai hari ini masih ada yang belum jelas statusnya," jelas Harif.

Dalam pertemuan itu, PPNI juga menegaskan dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional dan implementasi dari Universal Health Coverage BPJS. Meski di beberapa tempat masih mempersoalkan defisit.

"Tapi kami lihat bahwa program itu sudah baik, cuma perlu ditambah implementasi dengan azas adil wajar. Karenanya kami usulkan ke pemerintah atau kementerian untuk bisa merevisi peraturan persentase pembagian jasanya. Karena kami masih dapatkan ketimpangan yang sangat jauh antartentaga kesehatan dalam konteks pelaksanaan JKN yang berkeadilan dan berkewajaran," jelasnya.

